

**FAKTOR PENDUKUNG DAN PENGHAMBAT KINERJA UMKM DALAM MENINGKATKAN  
DAYA SAING**

Oleh :

**Audrey M. Siahaan**

**Rusliaman Siahaan**

**Yanti Elisabet Siahaan**

**Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas HKBP Nommensen Medan**

**ABSTRAK**

Pesatnya pertumbuhan ekonomi di tanah air diamini oleh Protofolio Leader dari Oxford Policy Management Ltd, Jonatan Mitchell. Ia menilai Indonesia termasuk dalam sepuluh besar Negara dengan pertumbuhan ekonomi tercepat yang salah satunya dipicu oleh pesatnya pertumbuhan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah. Pada zaman globalisasi seperti sekarang ini, semua orang harus berlomba-lomba menjalankan UMKM dan meraih peluang bisnis yang ada. Untuk itu, diperlukan pengaturan keuangan bisnis yang baik untuk menunjang keberlangsungan UMKM. Pada era serba digital seperti ini, teknologi ikut memainkan peran dalam mendorong perkembangan UMKM untuk berkompetisi di panggung global. CEO Qasir, Michael Williem mengatakan keterlambatan dalam memprediksi perkembangan bentuk kompetisi di masa mendatang tanpa disadari dapat menjadi penyebab usahawan mikro dan kecil sulit berkembang. Apalagi, bisnis yang sudah berjalan lama sering dianggap aman dari ancaman persaingan usaha. Menurutnya, usahawan mikro dan kecil menjamur karena kemudahan memasuki dunia usaha, namun seringkali terlewat, mereka tidak membekali diri dengan kesiapan menghadapi persaingan yang berganti seiring perkembangan teknologi. Selain itu, masih banyak juga para usahawan UMKM yang belum mengerti bagaimana cara meningkatkan daya saing mereka agar usaha tersebut dapat bersaing secara kompetitif dengan usaha yang lain. Oleh karena itu, akan dibahas tentang apa saja yang menjadi penghambat ataupun pendukung dalam meningkatkan daya saing dalam UMKM.

**Kata Kunci: UMKM, Kinerja, Daya Saing**

**PENDAHULUAN**

Berdasarkan data statistika 2019, penduduk ASEAN diproyeksikan berjumlah 647,45 juta jiwa. Angka tersebut meningkat 1% dibandingkan dengan estimasi jumlah penduduk pada 2017. Indonesia selama sepuluh tahun berturut-turut menjadi Negara dengan jumlah penduduk terbanyak di ASEAN. Pada tahun 2018, jumlah penduduk Indonesia mencapai 264,26 juta jiwa atau sepertiga dari total penduduk di ASEAN. Dengan jumlah penduduk yang besar tersebut, perlu diimbangi dengan pertumbuhan perekonomian yang

tinggi dengan cara membuka jumlah lapangan kerja yang luas. Indonesia sebagai negara berkembang yang merdeka, harus secara mandiri dapat membuka lapangan kerja tersebut dengan cermat, yakni dengan mendukung usaha-usaha yang didirikan oleh anak-anak bangsa sehingga ekonomi negara dapat bertumbuh. Namun permasalahan sosial yang sampai saat ini masih dihadapi oleh Indonesia dalam menumbuhkan ekonomi nasional adalah kemiskinan dan pengangguran. Pada tahun 2013, jumlah penduduk miskin (penduduk

dengan pengeluaran per kapita perbulan dibawah Garis Kemiskinan) di Indonesia mencapai 28,07 juta orang (Profil Kemiskinan di Indonesia Maret 2013, 2013). Sedangkan jumlah angkatan kerja di Indonesia pada Februari 2013 mencapai 121,2 juta orang, sedangkan jumlah penduduk yang bekerja di Indonesia pada Februari 2013 mencapai 114,0 juta orang. Maka dapat disimpulkan bahwa jumlah pengangguran di Indonesia mencapai 7,2 juta orang (Keadaan Ketenagakerjaan Februari 2013).

Dengan jumlah kemiskinan dan pengangguran yang cukup tinggi, salah satu alternatifnya adalah dengan membuka usaha mikro dan kecil sehingga dapat menyerap pengangguran dan mengurangi jumlah kemiskinan. Kemampuan usaha mikro dan kecil menampung jumlah pekerja dibuktikan dengan data statistik dari Badan Pusat Statistik (BPS) yang menyatakan bahwa penyerapan jumlah tenaga kerja menurut skala usaha, yakni 62,68 persen bekerja pada usaha mikro, 21,91 persen pada usaha kecil, 5,39 persen pada usaha menengah, dan 10,02 persen pada usaha besar (Hasil Pendaftaran (Listing) Perusahaan/Usaha Sensus Ekonomi 2006, 2006). Dalam dunia usaha terbagi menjadi sektor menurut formalitasnya, yakni sektor formal dan informal. Baik dari kedua sektor memberikan kontribusi pada penyerapan tenaga kerja dan pertumbuhan ekonomi nasional. Namun terbatasnya daya serap tenaga kerja pada sektor formal menyebabkan pencari kerja yang tidak terserap menjadi pengangguran. Alternatif usaha yang dapat dilakukan adalah dengan membuka usaha di sektor informal. Bahkan, sektor informal mampu menutupi keterbatasan penyerapan tenaga kerja. Menurut Badan Pusat Statistik (BPS), pada Agustus 2012 terdapat sekitar 44,2 juta orang (39,86

persen) bekerja pada sektor formal dan 66,6 juta orang (60,14 persen) bekerja pada sektor informal (Keadaan Ketenagakerjaan Agustus 2012, 2012).

Akses atau pintu-pintu untuk memasuki sektor informal dalam bentuk usaha mikro, usaha kecil dan usaha menengah relatif sangat terbuka, terutama bagi mereka yang mampu melihat peluang usaha (Mulyadi, 2009). Namun keterbatasan kemampuan dalam pengelolaan usaha yang masih bersifat tradisional dan informasi tentang dunia usaha sangat terbatas, jumlah dan kualitas tenaga kerja yang terbatas, sifat kualitas barang yang dijual hanya sebatas kebutuhan untuk barang dagangan saja (Sriyana, 2010; Sherazi et.al, 2013). Dalam menjalani dan mengembangkan bisnis dapat dipastikan akan mengalami beberapa hambatan, terlebih bagi para pengusaha kecil menengah.

Dalam pertumbuhan usaha, lingkungan bisnis memiliki peran penting terhadap kesuksesan suatu bisnis (Delmar dan Wiklund, 2008). Smit et al. (dalam Olawale dan Garwe, 2010) mengartikan lingkungan bisnis sebagai faktor internal dan eksternal yang dapat memberi pengaruh dan kesuksesan organisasi. Di samping faktor internal, penting bagi organisasi untuk meningkatkan dan memperhitungkan faktor eksternal. Sehingga penulis menyimpulkan bahwa hambatan berasal dari dua faktor yakni, faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal adalah faktor dalam lingkungan suatu perusahaan yang sebagian besar dikontrol oleh perusahaan. Faktor internal berpengaruh dalam kompetensi atau kinerja sebuah perusahaan. Menurut Cassar; Barbosa dan Moraes (dalam Olawale dan Garwe, 2010), faktor internal meliputi, keuangan (terutama internal keuangan seperti pemilik ekuitas kontribusi dan jaminan),

keahlian manajerial, lokasi, investasi dalam teknologi informasi dan biaya produksi. Faktor eksternal merupakan semua kejadian di luar perusahaan yang memiliki potensi untuk mempengaruhi perusahaan. Faktor eksternal meliputi ekonomi dan pasar, kejahatan dan korupsi, tenaga kerja, infrastruktur, dan peraturan. Dalam pertumbuhan usaha, adapun hambatan yang dialami oleh sektor formal dan sektor informal. Penulis menemukan beberapa penelitian terkait dengan hambatan pertumbuhan usaha mikro dan kecil di berbagai Negara. Seperti penelitian yang dilakukan oleh Olawe dan Garwe (2010), Sherazi (2013), Hashi (2001), Bartlett dan Bukvič (2001). Baik sektor formal dan informal, kedua sektor tersebut berperan dalam pertumbuhan ekonomi, dibuktikan dengan penyerapan tenaga kerja, dengan penyerapan tersebut, sekaligus membantu memberantas pengangguran dan kemiskinan di Indonesia.

Dalam zaman globalisasi perdagangan seperti sekarang ini, peranan sektor swasta mengalami peningkatan diberbagai negara berkembang. Secara paralel maupun sebagai bagian dari perubahan ini, munculnya sektor usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) merupakan bagian yang signifikan dalam pengembangan ekonomi dan penciptaan lapangan pekerjaan. Lebih dari 99% dari unit bisnis Indonesia adalah usaha kecil dan mikro. Berdasarkan data Kementrian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Kemenkop UKM) melansir total pelaku UMKM yang ada di Indonesia tahun 2018 yaitu 59,2 juta dan sekitar 3,79 juta sudah memanfaatkan platform online dalam memasarkan produknya. Hal tersebut menunjukkan bahwa UKM merupakan landasan perekonomian di Indonesia.

UMKM (Usaha Mikro Kecil Menengah) adalah kelompok usaha yang memiliki jumlah paling besar. UMKM merupakan kelompok pelaku ekonomi terbesar dalam perekonomian Indonesia dan terbukti menjadi katup pengaman perekonomian nasional dalam masa krisis, serta menjadi dinamisiator pertumbuhan ekonomi pasca krisis ekonomi. Selain menjadi sektor usaha yang paling besar kontribusinya terhadap pembangunan nasional, UMKM juga menciptakan peluang kerja yang cukup besar bagi tenaga kerja dalam negeri, sehingga membantu upaya mengurangi pengangguran.

Saat ini Negara Indonesia sudah berada pada Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA). Hal itu tentu memiliki dampak tersendiri bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah. Pasalnya, mereka harus bersaing dengan pelaku-pelaku usaha dari negara-negara lain di ASEAN. Banyak barang impor yang masuk dengan harga yang lebih murah dan persaingan antar masyarakat Asia semakin ketat dalam dunia pekerjaan, apabila kalah bersaing maka akan menyebabkan pengangguran yang merajalela. Banyaknya franchise dari luar yang masuk ke Indonesia menyebabkan banyak UMKM yang gulung tikar.

Usaha kecil menengah tidak pernah lepas dari berbagai kendala, banyak kendala yang harus dihadapi dan dipecahkan khususnya usaha kecil menengah. Usaha kecil biasanya mengalami berbagai kendala dasar yang segera harus diselesaikan. Usaha-usaha kecil ini biasanya menghadapi kesulitan atau kendala seperti sistem permodalan, sistem pengelolaan, kualitas sumber daya dan kondisi persaingan. Hal yang paling dasar yang menjadi kendala atau hambatan dalam menjalankan usaha kecil menengah adalah permodalan. Umumnya, usaha

kecil memiliki keterbatasan pendanaan sehingga produktivitasnya tidak dapat maksimal. Masalah berikutnya yang biasa dihadapi adalah mengenai sistem pengelolaan. Masalah yang satu ini berkaitan dengan kemampuan sumber daya manusia yang ada. Kebanyakan usaha kecil dijalankan dengan manajemen yang kurang baik dan kurang profesional. Hal berikutnya yang sering menjadi kendala adalah mengenai kerasnya persaingan usaha. Sebagai usaha kecil tentu saja kemampuan UKM dalam bersaing masih sangat kecil. Maka sudah menjadi keharusan untuk melakukan penguatan kelompok UMKM yang melibatkan banyak kelompok. Perkembangan potensi UMKM di Indonesia tidak terlepas dari dukungan perbankan dalam penyaluran kredit kepada pelaku UMKM. Menurut data Bank Indonesia pada akhir Triwulan IV 2018 baki debit kredit UMKM mencapai Rp. 1.086 triliun, tumbuh 9,7%. Pertumbuhan tersebut naik dibandingkan pertumbuhan triwulan sebelumnya yaitu 9,1%. Peningkatan kredit Triwulan IV 2018 terjadi pada klasifikasi usaha kredit usaha menengah sebesar 7,51% dibandingkan triwulan sebelumnya sebesar 5,5%. Sedangkan usaha kredit mikro dan kecil melambat masing-masing sebesar 12,7% dan 10,4% dibandingkan pertumbuhan triwulan sebelumnya sebesar 13,6% dan 10,8%. Kredit UMKM ini terutama disalurkan untuk membiayai kredit modal kerja sebesar 74,7% sedangkan untuk kredit investasi tercatat 25,3%. Oleh karena itu perlu adanya kesadaran kita untuk mengembangkan UMKM di Indonesia agar terciptanya kesejahteraan masyarakat.

#### **RUMUSAN MASALAH**

Berikut rumusan masalah dalam artikel ini adalah:

1. Apa faktor yang menghambat kinerja UMKM dalam meningkatkan daya saing ?
2. Apa faktor yang mendukung kinerja UMKM dalam meningkatkan daya saing ?
3. Apa upaya yang harus dilakukan agar kinerja UMKM dapat meningkat ?

#### **LITERATUR**

Menurut Rudjito, UMKM adalah usaha yang punya peranan penting dalam perekonomian Negara Indonesia, baik dari sisi lapangan kerja yang tercipta maupun dari sisi jumlahnya. Menurut Ina Primiana, UMKM adalah pengembangan empat kegiatan ekonomi utama yang menjadi motor penggerak pembangunan Indonesia, yaitu: Industri manufaktur, Agribisnis, Bisnis kelautan, dan Sumber daya manusia. Menurut M. Kwartono, UMKM adalah kegiatan ekonomi rakyat yang punya kekayaan bersih maksimal Rp. 200.000.000,- dimana tanah dan bangunan tempat usaha tidak diperhitungkan

UMKM memiliki beberapa tujuan yaitu : (1). Menumbuhkan dan mengembangkan kemampuan UMKM agar usahanya dapat tangguh dan mandiri; (2). Mewujudkan peningkatan struktur perekonomian Negara; (3). Meningkatkan peran UMKM dalam pembangunan daerah, penciptaan lapangan kerja, pemerataan pendapatan, pertumbuhan ekonomi, dan pengentasan kemiskinan.

Pengukuran kinerja adalah proses di mana organisasi menetapkan parameter hasil untuk dicapai oleh program, investasi, dan akuisisi yang dilakukan. Proses pengukuran kinerja sering kali membutuhkan penggunaan bukti statistic untuk menentukan tingkat kemajuan suatu organisasi dalam meraih tujuannya

Daya saing adalah tingkat produktivitas yang diartikan sebagai output yang dihasilkan oleh suatu tenaga kerja. (Michael Porter : 1990). Daya saing adalah kesanggupan kemampuan dan kekuatan untuk bersaing (Brata Atmaja : 1994).

Berikut ini ada beberapa jurnal yang saya saji dalam pembahasan, diantaranya:

**Judul: Kajian Strategi Pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) DI Kota Tarakan** (Penulis : Ariani dan Mohamad Nur Utomo)

Permasalahan pada artikel ini adalah Hambatan dan masalah yang dihadapi dalam mengembangkan usaha pada UMKM di kota Tarakan pada umumnya dapat disebabkan oleh faktor internal dan eksternal. Dimana yang bersifat internal yaitu meliputi dana keterbatasan ketersediaan tenaga kerja atau SDM, manajemen yang masih sangat sederhana dan belum efektif sehingga kurang efisien, adanya kekurangan atau keterbatasan dalam segi permodalan, kurangnya sarana dan prasarana serta lemahnya pengetahuan tentang sistem pemasaran dan kurangnya infrastruktur yang kurang mendukung. Permasalahan utama penyebab lemahnya pertumbuhan UMKM yaitu dari segi permodalan dan ketersediaan sarana dan prasarana penunjang bagi peningkatan usaha pada bidang UMKM di kota Tarakan. Beberapa permasalahan dan hambatan yang ditemui baik dalam hal manajemen secara internal dan eksternal maupun dalam pelaksanaan kegiatan usaha yang antara lain sebagai berikut: (1) Terbatasnya modal yang dimiliki oleh pelaku UMKM; (2) Masih rendahnya pengetahuan dan pemahaman pelaku UMKM dalam mengembangkan dan mempertahankan usaha di dunia bisnis; (3) Kurangnya ketersediaan sarana dan prasarana yang

dibutuhkan oleh pelaku UMKM dalam membantu pengembangan dan peningkatan usahanya; (4) Adanya hambatan secara eksternal seperti kesediaan tenaga listrik yang dianggap mengganggu kegiatan operasional dari UMKM di kota Tarakan; (5) Kurangnya pemahaman dari pelaku UMKM tentang strategi, sistem dan proses pemasaran bagi hasil produksinya; (6) Kurang pahalannya mengenai birokrasi dalam dunia usaha untuk dapat menembus pasar yang lebih luas dari pasar lokal yang telah mereka lakukan dan minimnya atau sedikitnya informasi mengenai pengembangan usaha bagi UMKM di kota Tarakan; (7) Kemampuan dalam penggunaan atau penerapan teknologi dalam menunjang peningkatan usaha dan kemampuan penerapan standar produk UMKM yang masih terbatas; (8) Akses sarana informasi yang dapat diakses oleh masyarakat masih terbatas dan kebijakan yang masih terlihat bias bagi pelaku UMKM di Kota Tarakan, sehingga mengurangi ruang gerak bagi pelaku UMKM kota Tarakan.

Hasil Penelitian pada artikel ini adalah Berdasarkan analisis internal dan eksternal UMKM kota Tarakan beserta diagram cartesius dapat diperoleh bahwa yang menjadi strategi utama adalah strategi Growth (pertumbuhan) dimana UMKM kota Tarakan memanfaatkan seluruh kekuatan UMKM yaitu mempertahankan kualitas dari bahan baku, legalitas/ijin produk yang masuk dalam kualifikasi, harga yang tetap bersaing dan melakukan peningkatan SDM di dalam UMKM di kota Tarakan. Permasalahan yang timbul dalam pengembangan usaha pada UMK M di Kota Tarakan dapat diatasi dengan menggunakan Strategi WO dimana strategi ini diterapkan berdasarkan pemanfaatan peluang yang ada dengan cara meminimalkan kelemahan yang ada dan strategi WT

dengan menitik beratkan pada kondisi perekonomian secara umum menjadi dasar perencanaan ke depan bagi perkembangan usaha UMKM Kota Tarakan. Bagi UMKM kota Tarakan agar menjaga stabilisasi dari usaha baik dari penggunaan bahan baku, pemasaran, tenaga kerja hingga birokrasi pemerintahan. Mempelajari dan membuat ijin paten guna mendapatkan perlindungan usaha baik dari monopoli maupun dari ekspansi eksternal dari pemerintah memperbaiki manajemen internal meminimalkan hambatan secara eksternal seperti kesediaan tenaga listrik yang dianggap mengganggu kegiatan operasional dari UMKM di kota Tarakan dengan menyediakan sarana dan prasarana yaitu pelengkap peralatan produksi. Bagi pemerintah dan lembaga terkait agar memberikan keleluasaan dalam pengembangan usaha UMKM di kota Tarakan baik dalam hal penyediaan pelatihan, sarana dan prasarana serta penyediaan informasi bagi pengembangan UMKM di kota Tarakan.

Kelemahan pada artikel ini adalah jurnal ini menggunakan penelitian pada banyak aspek sehingga analisisnya memakan banyak waktu dan juga perbandingan nya harus disesuaikan pada seluruh aspek yang sudah dicantumkan.

Kekuatan pada artikel ini adalah jurnal ini menggunakan analisis SWOT, hal ini akan memberikan hasil yang sangat baik karena mencakup faktor internal dan eksternal sehingga memungkinkan semua aspek dapat dianalisis dengan baik.

**Judul: Studi Deskriptif tentang Faktor Penghambat Pengembangan Industri Kecil dan Menengah di Kampung Binaan Bordir di Kelurahan Kedung Baruk Kecamatan Rungkut Surabaya (Penulis : Emas Prasasti)**

Permasalahan pada artikel ini adalah salah satu tiang penyangga perekonomian nasional dan tingkat daerah adalah sektor usaha mikro kecil menengah. Perkembangan usaha mikro kecil menengah yang ada di Indonesia ini berkembang cukup pesat. Berkembang pesatnya usaha, mikro, kecil dan menengah yang ada di Indonesia ini tidak berjalan secara mulus. Artinya perkembangan yang terjadi pada sektor usaha mikro kecil dan menengah ini mengalami beberapa permasalahan didalamnya. Permasalahan klasik yang selalu dialami oleh sektor usaha yang ada di Indonesia adalah permasalahan bahan baku, pemasaran, permodalan, distribusi, energy dan tenaga kerja (Tambunan, 2001: 74). Banyaknya kontribusi serta meningkatnya jumlah pelaku usaha mikro kecil dan menengah ini juga diikuti oleh beberapa pelaku usaha mikro kecil dan menengah yang gulung tikar. Artinya tidak sedikit usaha yang ada di Indonesia ini banyak yang bangkrut. Permasalahan yang harus menjadi focus perhatian pemerintah Indonesia, khususnya pemerintah daerah Surabaya sendiri adalah era sekarang ini sudah masuk pada era perdagangan bebas ASEAN. Perdagangan bebas ASEAN ini membentuk suatu pasar tunggal pada kawasan negara-negara di ASEAN sehingga barang-barang produksi serta tenaga kerja dari luar negeri dapat masuk ke negara Indonesia dengan bebas, tanpa harus terkena pajak yang biasanya dikenakan (dalam [www.tarif.depkeu.go.id](http://www.tarif.depkeu.go.id)) . Pada level daerah sendiri khususnya Surabaya, pelaku usaha bordir yang ada di kampung binaan border. sendiri sangat sulit untuk berkembang. Artinya usaha yang ada sulit bersaing dan berkembang. Jika dibandingkan dengan kampung binaan yang lain bordir ini sulit untuk berkembang (dalam [www.disperdagin.surabaya.go.id](http://www.disperdagin.surabaya.go.id)). Hal ini perlu diantisipasi oleh pemerintah

mengingat di antara 10 negara yang ada di kawasan ASEAN Indonesia merupakan negara dengan jumlah penduduk terbesar. Ketika barang ataupun produk yang dimiliki oleh Indonesia mempunyai kualitas yang jelek dibandingkan dengan produk dari negara lain maka bukan tidak mungkin Indonesia akan menjadi pasar dari seluruh produk negara lain.

Hasil Penelitian pada artikel ini adalah terdapat banyak faktor penghambat yang dialami oleh pelaku usaha industry kecil dan menengah kampung binaan bordir di Kedung Baruk Kecamatan Rungt. Akan tetapi dari beberapa faktor yang menjadi indikator peneliti, terdapat faktor penghambat dominan di industry kecil dan menengah bordir yakni : 1. Sumber Daya Manusia : sumber daya manusia yang dimiliki oleh industry kecil dan menengah dari segi kuantitas serta kualitas masih sangat minim 2. Permodalan : industry kecil dan menengah bordir sangat minim dalam hal modal. Pelaku usaha yang ada di kampung binaan bordir ini berangkat dari keluarga yang kurang mampu sehingga untuk masalah modal, pelaku usaha bordir ini sangat kecil. 3. Teknologi: Keberadaan teknologi ini belum dimanfaatkan oleh pelaku usaha ini secara maksimal karena pelaku usaha sudah banyak yang berumur. 4. Regulasi pemerintah : Selama ini peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah belum menunjukkan keberpihakannya pada pelaku usaha. Masih ada beberapa peraturan dari pihak dinas perindustrian dan perdagangan yang membuat industry kecil dan menengah ini kurang berkembang 5. Pesaing : Pesaing yang hadir bukan dari sesama bordir mesin akan tetapi berasal dari bordir komputer yang memang lebih mudah dan lebih cepat untuk diselesaikan. Sehingga sulit untuk berkembang Dalam melakukan pengembangan hendaknya

aspek sumber daya manusia menjadi fokus penting yang harus diperhatikan. Pengembangan sumber daya manusia yang ada di industry kecil dan menengah bordir dapat dilakukan melalui pemberian pelatihan secara berkala dalam hal inovasi produk, pemberian motivasi serta pemanfaatan teknologi - Untuk masalah permodalan, pemerintah hendaknya memberikan rekomendasi kredit yang mudah dijangkau oleh pelaku usaha melalui kerja sama dengan pihak perbankan - Regulasi yang dikeluarkan pemerintah hendaknya dapat mengembangkan potensi 21 bordir yang ada di Surabaya bukan malah mengeluarkan kebijakan yang menjadikan kampung binaan bordir ini tidak berkembang

Kelemahan pada artikel ini adalah jurnal ini menggunakan metode kualitatif dengan tipe penelitian deskriptif. Teknik penentuan informan yang digunakan oleh peneliti adalah purposive sampling yang berkembang menjadi snowball. Teknik pengumpulan data dari peneliti menggunakan tiga cara yakni dengan observasi, dokumentasi serta wawancara. Untuk memeriksa keabsahan data yang diperoleh, peneliti menggunakan triangulasi data. Hal ini akan membutuhkan waktu yang lama serta lokasi penelitian yang cukup luas. Selain itu jurnal ini juga menggunakan banyak data angka dalam table yang sebenarnya bisa disajikan dalam bentuk kesimpulan saja, sehingga dapat lebih mudah dipahami.

Kekuatan pada artikel ini adalah jurnal ini menganalisis factor internal dan juga factor eksternal. Selain memberitahu factor-faktor pengembangan organisasi, peneliti juga memberikan hal yang seharusnya dipenuhi agar dapat mendukung pengembangan organisasi.

**Judul: Efektivitas Pelaksanaan Program Pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Kota Samarinda (Studi pada Dinas Koperasi dan UMKM Kota Samarinda) (Penulis : Euis Hasmita Putri)**

Permasalahan pada artikel ini adalah pemerintah kota Samarinda berusaha untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui penyediaan berbagai kesempatan berusaha di bidang UMKM. Namun usaha tersebut terkendala dari pihak UMKM itu sendiri, adapun serangkaian masalah yang dihadapi oleh UMKM, seperti : 1. Modal terbatas Keterbatasan modal terutama di sebabkan oleh keterbatasan akses langsung terhadap berbagai informasi, layanan dan fasilitas keuangan yang di sediakan oleh lembaga keuangan formal maupun non formal. 2. Kemampuan teknik produksi dan manajemen terbatas Pola manajemen yang sesuai dengan kebutuhan terhadap perkembangan usaha sulit di temukan, antara lain karena pengetahuan dan manajerial skill pengusaha kecil dan menengah belum mampu menyusun strategi bisnis yang tepat. Kemampuan usaha dalam mengorganisasikan diri dan karyawan masih lemah, sehingga terjadi pembagian kerja yang tidak jelas dan seringkali pengusaha harus bertindak “one men show” 3. Pemasaran yang relatif sulit Di harapkan pada struktur pasar yang sangat kompetitif. Bukan saja antara industri kecil melainkan ada kalanya juga dengan industri besar. Disamping itu, kesulitan pemasaran juga disebabkan oleh berbagai faktor pendukung utama seperti informasi mengenai perubahan dan peluang pasar yang ada di dalam maupun di luar negeri. 4. Permasalahan sumber daya manusia yang rendah Belum memadainya sumber daya manusia yang mampu menciptakan peluang sendiri untuk memulai sebuah usaha. Sehingga bisa di katakan masih

sangat lemah sumber daya manusia yang ada saat ini, Sulistyastuti (2004) dalam Utama (2013). UMKM juga masih menghadapi berbagai permasalahan yang terkait dengan iklim usaha seperti: (a) besarnya biaya transaksi, panjangnya proses perijinan dan timbulnya berbagai pungutan; dan (b) praktik usaha yang tidak sehat. Selain itu, otonomi daerah yang di harapkan mampu mempercepat tumbuhnya iklim usaha yang kondusif bagi UMKM ternyata belum menunjukkan kemajuan yang merata. Melihat kendala-kendala di atas, maka Dinas Koperasi Kota Samarinda perlu melakukan pengembangan terhadap usaha kecil dan menengah. Dinas Koperasi Kota Samarinda adalah unsur pelaksanaan Pemerintah kota yang memiliki tugas melaksanakan sebagian urusan rumah tangga daerah dalam bidang pengkoperasian pengusaha kecil dan menengah serta melaksanakan tugas pembantuan sesuai dengan bidang tugasnya. Dengan demikian pengembangan terhadap usaha kecil dan menengah sudah menjadi tugas pokok dalam program kerja dinas koperasi. Program pengembangan UMKM itu meliputi kegiatan pelatihan, pembinaan, pemberdayaan, sosialisasi dan pengawasan.

Hasil Penelitian pada artikel ini adalah 1. Efektivitas a. Efektivitas pelaksanaan program pengembangan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) di Kota Samarinda sebagai tempat pelatihan. Hingga saat ini pelatihan yang dilakukan oleh Dinas Koperasi dan UMKM Kota Samarinda sudah berjalan cukup maksimal b. Efektivitas pelaksanaan program pengembangan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) di Kota Samarinda melalui pemberdayaan yang telah dilakukan oleh Dinas Koperasi dan Kota samarinda masih dalam proses menuju maksimal dan dari Dinas pun akan selalu mengupayakan agar



program pemberdayaan yang dilakukan mencapai 100% pengerjaannya dalam artian belum maksimal. c. Efektivitas pelaksanaan program pengembangan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) di Kota Samarinda melalui pembinaan yang telah di jalankan hingga saat ini tentunya sudah berjalan baik dan maksimal. Dengan mengadakan pembinaan-pembinaan seperti kursus, pameran dan seminar secara rutin Dinas Koperasi telah membina para pelaku UMKM yang ada di Kota Samarinda untuk lebih maju dan berkembang dalam menjalankan usaha. Dengan pembinaan yang maksimal tentunya juga dapat menghasilkan para pelaku UMKM yang berdaya guna dan berhasil guna sehingga bisa bersaing di pasar dalam maupun luar negeri. d. Efektivitas pelaksanaan program pengembangan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) di Kota Samarinda melalui sosialisasi yang telah dilakukan juga telah berjalan dengan baik, contoh dari sosialisasi seperti seminar kewirausahaan dan pameran yang telah di adakan oleh Dinas Koperasi dan UMKM Kota Samarinda sangat berguna bagi para pelaku UMKM karena dengan sosialisasi seperti inilah efektivitas pelaksanaan program pengembangan di Kota Samarinda bisa terwujud melalui keberhasilan para pelaku UMKM yang telah di bina untuk mengikuti sosialisasi yang di adakan. Sejauh ini minat pelaku UMKM sangat positif dan semangat sekali dalam mengikuti berbagai sosialisasi yang di adakan. e. Efektivitas pelaksanaan program pengembangan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) di Kota Samarinda melalui pengawasan sudah cukup baik namun masih kurang maksimal, masih banyak keluhan para pelaku UMKM kepada Dinas karena tidak ada jadwal berkunjung tiba-tiba datang tanpa memberi kabar sebelumnya. Akan tetapi sejauh ini upaya pengawasan yang telah Dilakukan Dinas Koperasi

dan UMKM Kota Samarinda telah cukup maksimal dalam pemberian fasilitas peralatan yang di butuhkan oleh para pelaku UMKM. 2. Faktor Penghambat a. Dana Anggaran atau Biaya (Modal terbatas) Defisit Anggaran yang memberikan dampak kurang efektivitas seluruh program-program seperti pelatihan hingga pengawasan. Faktor biaya dan anggaran tentunya sangat berperan di sini, karena jika tidak ada anggaran yang masuk dari pusat maka Dinas Koperasi dan UMKM Kota Samarinda tentunya tidak bisa menjalankan program-programnya secara maksimal. Berhubung segala kegiatan yang dijalankan pasti memerlukan Dana yang tidak sedikit. Maka dari itu butuh kondisi keuangan yang stabil dari pihak pemerintah agar segala kegiatan pelatihan, pengembangan, pemberdayaan, sosialisasi dan pengawasan berjalan baik dan sebagai mana mestinya b. Sumber Daya Manusia Di karenakan kurangnya pengawasan dari pihak Dinas kepada para pelaku UMKM, masih belum di bentuknya jadwal yang teratur untuk pengawasan yang di lakukan dan juga minimnya tenaga kerja atau pegawai yang langsung terjun ke lapangan untuk mengawasi para pelaku UMKM di Kota Samarinda. Tidak hanya sumber daya manusia dari pihak Dinas akan tetapi sumber daya manusia dari para pelaku UMKM juga masih belum banyak yang paham dan mengerti bagaimana tata cara membuka usaha yang baik, sehingga masih ada saja para pelaku usaha yang tidak mengurus surat izin berdiri usaha dan seringkali masih banyak di temukan UMKM yang berdiri tanpa izin dan tidak terdaftar di Dinas Koperasi dan UMKM Kota Samarinda. c. Kemampuan teknik produksi dan manajemen terbatas Pola manajemen yang sesuai dengan kebutuhan terhadap perkembangan usaha sulit di temukan, antara lain karena pengetahuan dan manajerial skill

pengusaha kecil dan menengah belum mampu menyusun strategi bisnis yang tepat. Kemampuan usaha dalam mengorganisasikan diri dan karyawan masih lemah, sehingga terjadi pembagian kerja yang tidak jelas dan seringkali pengusaha harus bertindak “one man show” d. Pemasaran yang relatif sulit Di harapkan pada struktur pasar yang sangat kompetitif. Bukan saja antara industri kecil melainkan ada kalanya juga dengan industri besar. Disamping itu, kesulitan pemasaran juga disebabkan oleh berbagai faktor pendukung utama seperti informasi mengenai perubahan dan peluang pasar yang ada di dalam maupun di luar negeri.

Kelemahan pada artikel ini adalah jurnal ini hanya menjelaskan teori saja mengenai efektifitas pengembangan UMKM, tidak memberikan data berupa angka yang dapat meyakinkan bahwasanya peneliti memang benar terjun ke lokasi.

Kekuatan pada artikel ini adalah. jurnal ini terlebih dahulu menjelaskan beberapa teori tentang beberapa istilah yang menjadi acuan dilakukannya penelitian sehingga dapat lebih mudah mengerti apa yang menjadi tujuan dari penelitian tersebut.

#### **METODOLOGI PENELITIAN**

Penulisan artikel ini memakai studi literatur untuk menemukan bagaimana keadaan UMKM serta penghambat dan pendukungnya dalam mencapai daya saing. Peneliti memeriksa dan mengumpulkan kesimpulan dari beberapa jurnal dan artikel yang berkaitan dengan Kelemahan ataupun Kekurangan UMKM dalam menangani daya saing dalam perekonomian.

#### **HASIL DAN ANALISIS**

Jika dilihat dari beberapa jurnal yang sudah saya jelaskan yaitu mengenai UMKM, dapat dikatakan bahwa keadaan UMKM pada saat itu kurang berkembang dengan baik. Seperti yang sudah dijelaskan bahwa adalah hal-hal yg menghambat perkembangan UMKM di Indonesia ketika UMKM merupakan salah satu kegiatan yang dapat mengurangi kemiskinan dan pengangguran karena dapat menambah lowongan pekerjaan dan pendapatan masyarakat umum.

Ditinjau dari jurnal yang sudah dibahas sebelumnya, hal-hal yang sangat berpotensi menghambat perkembangan UMKM di Indonesia yaitu dikarenakan terbatasnya modal, pemasaran yang relative sulit, kemampuan SDM yang tidak mendukung, perkembangan teknologi yang tidak bisa diimbangi masyarakat, dan ada banyak hal lainnya.

Pada Jurnal II contohnya dikatakan bahwa, di daerah Kampung Binaan Bordir di Kelurahan Kedung Baruk Kecamatan Rungkut Surabaya faktor penghambat dominan di industry kecil dan menengah bordir yakni : 1. Sumber Daya Manusia : sumber daya manusia yang dimiliki oleh industry kecil dan menengah dari segi kuantitas serta kualitas masih sangat minim 2. Permodalan : industry kecil dan menengah bordir sangat minim dalam hal modal. Pelaku usaha yang ada di kampung binaan bordir ini berangkat dari keluarga yang kurang mampu sehingga untuk masalah modal, pelaku usaha bordir ini sangat kecil 3. Teknologi: Keberadaan teknologi ini belum dimanfaatkan oleh pelaku usaha ini secara maksimal karena pelaku usaha sudah banyak yang berumur. 4. Regulasi pemerintah : Selama ini peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah belum menunjukkan

keberpihakannya pada pelaku usaha. Masih ada beberapa peraturan dari pihak dinas perindustrian dan perdagangan yang membuat industry kecil dan menengah ini kurang berkembang. 5. Pesaing : Pesaing yang hadir bukan dari sesama bordir mesin akan tetapi berasal dari bordir komputer yang memang lebih mudah dan lebih cepat untuk diselesaikan. Sehingga sulit untuk berkembang.

Dalam melakukan pengembangan, hendaknya aspek sumber daya manusia menjadi fokus penting yang harus diperhatikan. Pengembangan sumber daya manusia yang ada di industri kecil dan menengah bordir dapat dilakukan melalui pemberian pelatihan secara berkala dalam hal inovasi produk, pemberian motivasi serta pemanfaatan teknologi. Untuk masalah permodalana, pemerintah hendaknya memberikan rekomendasi kredit yang mudah dijangkau oleh pelaku usaha melalui kerja sama dengan pihak perbankan. Regulasi yang dikeluarkan pemerintah hendaknya dapat mengembangkan potensi bordir yang ada di Surabaya bukan malah mengeluarkan kebijakan yang menjadikan kampung binaan bordir ini tidak berkembang.

Namun jika dilihat perkembangan UMKM di Indonesia Sejak 2010, sudah menunjukkan adanya perkembangan. Membaca data yang ditunjukkan oleh Kementerian Koperasi dan UKM RI, UMKM secara keseluruhan mengalami perkembangan dan pertumbuhan yang baik seiring berganti tahun. Misalnya pada tahun 2010, total jumlah unit UMKM sebanyak 52.769.426. Lalu dalam pemberitaan terakhir, jumlah tersebut sudah mencapai angka 63 juta. Berdasarkan situs [depkop.go.id](http://depkop.go.id), berikut data perkembangan UMKM di Indonesia berdasarkan jumlah unit dan jumlah PDB dari tahun 2010 sampai 2017.

**Tabel**  
**data perkembangan UMKM di**  
**Indonesia**

Tahun	Total Jumlah Unit (Kecil, Mikro, dan Menengah)	Total Jumlah PDB atas Dasar Harga Berlaku
2010	52,769,426	Rp5,285,290
2011	54,119,971	Rp6,068,762
2012	55,211,396	Rp7,445,344
2013	56,539,560	Rp8,241,864
2014	57,900,787	Rp9,014,951
2015	59,267,759	Rp1,014,134
2016	61,656,547	Rp11,712,450
2017	62,928,077	Rp12,840,859

Secara persentase, jumlah UMKM di Indonesia mencapai 99,9% dari total unit usaha di Indonesia. Dengan data ini, dapat disimpulkan jika UMKM memiliki peran besar dalam menyumbang pertumbuhan ekonomi Tanah Air. Perkembangan UMKM di Indonesia menunjukkan pola yang baik. Adanya dukungan dari pemerintah melalui cara-cara tertentu memengaruhi angka pertumbuhan jumlah unit usaha mikro, kecil, dan menengah. Pemanfaatan sarana teknologi dan komunikasi, alokasi kredit usaha dari perbankan untuk rakyat, serta menurunnya tarif pajak PPh Final menjadi beberapa faktor yang mendorong perkembangan UMKM di Indonesia. Meski begitu, pertumbuhan ini dinilai masih lambat karena beberapa faktor pendukung tersebut dinilai belum terlalu efektif.

Beberapa faktor penghambat UMKM dalam meningkatkan daya saing ialah : (a). Modal terbatas Keterbatasan modal terutama disebabkan oleh keterbatasan akses langsung terhadap berbagai informasi, layanan dan fasilitas keuangan yang di sediakan oleh lembaga keuangan formal maupun non formal; (b). Kemampuan teknik produksi dan manajemen terbatas Pola manajemen yang sesuai dengan kebutuhan terhadap perkembangan usaha sulit ditemukan, antara lain

karena pengetahuan dan manajerial skill pengusaha kecil dan menengah belum mampu menyusun strategi bisnis yang tepat. Kemampuan usaha dalam mengorganisasikan diri dan karyawan masih lemah, sehingga terjadi pembagian kerja yang tidak jelas dan seringkali pengusaha harus bertindak “one man show”; (c). Pemasaran yang relatif sulit Diharapkan pada struktur pasar yang sangat kompetitif. Bukan saja antara industri kecil melainkan ada kalanya juga dengan industri besar. Disamping itu, kesulitan pemasaran juga disebabkan oleh berbagai faktor pendukung utama seperti informasi mengenai perubahan dan peluang pasar yang ada di dalam maupun di luar negeri; (d). UMKM masih lemah dalam kemampuan manajemen usaha, kualitas sumber daya manusia (SDM) yang masih terbatas, serta lemahnya akses ke lembaga keuangan, khususnya perbankan; (e) terbatasnya kemampuan UMKM dalam mengakses informasi untuk mempromosikan produk UMKM; (f) Belum memadainya sumber daya manusia yang mampu menciptakan peluang sendiri untuk memulai sebuah usaha. Sehingga bisa di katakan masih sangat lemah sumber daya manusia yang ada saat ini.

Beberapa faktor pendukung UMKM dalam meningkatkan daya saing ialah : (a). Pemanfaatan Sarana Teknologi, Informasi dan Komunikasi Majunya UMKM di Indonesia tidak terlepas dari perkembangan teknologi yang terjadi saat ini. Beberapa penelitian menunjukkan kalau salah satu faktor yang mendukung perkembangan UMKM adalah karena pemanfaatan sarana TIK (teknologi, informasi dan komunikasi). Para pelaku usaha mulai memanfaatkan sarana teknologi seperti smartphone untuk melebarkan pasar usahanya, serta menggunakan aplikasi komunikasi seperti WhatsApp dan media sosial untuk memasarkan produk

yang dijual. Bahkan, sudah menjadi target pemerintah untuk membuat pelaku UMKM untuk memanfaatkan dunia digital, seperti e-commerce, untuk menjual dan mengembangkan usahanya. Mengutip dari salah satu sumber berita, Kemenkop RI melaporkan kalau sudah ada sekitar 8 juta UMKM yang sudah Go-Digital pada tahun 2017 lalu. Jumlah ini sebanyak 14% dari total 59.2 juta UMKM yang berdiri di Indonesia. Angka ini diharapkan untuk terus bertambah karena tingginya jumlah UMKM yang Go-Digital sejalan dengan tujuan pemerintah yang ingin menjadikan Indonesia sebagai Digital Energy of Asia tahun 2020 mendatang; (b). Kemudahan Peminjaman Modal Usaha Perkembangan UMKM di Indonesia tidak bisa lepas dari dukungan perbankan di Tanah Air. Terbukanya akses pembiayaan perbankan serta menurunnya kredit usaha rakyat, mendorong tumbuhnya usaha mikro, kecil, dan menengah. Bahkan, perbankan wajib mengalokasikan kredit pada UMKM mulai tahun 2015. Berawal dari 5%, angka bunga itu terus tumbuh hingga 20% pada akhir tahun 2018 lalu. Selain itu, nominal modal memulai usaha, khususnya usaha mikro, dianggap tidak terlalu besar sehingga siapapun dapat menjadi pelaku UMKM dengan cepat. Dengan begitu, semakin menarik pertumbuhan jumlah UMKM di Indonesia; (c). Menurunnya Tarif PPH Final Pelaku UMKM termasuk ke dalam wajib pajak dan wajib hitung, setor, lapor pajak penghasilannya pada negara. Pajak yang harus disetor dan dilaporkan merupakan pajak penghasilan final atau PPh Final. Awalnya, tarif PPh Final yang ditetapkan untuk pelaku UMKM ini sebesar 1%. Namun pada bulan Juli 2018, Pemerintah Indonesia mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 2018 yang menetapkan tarif PPh Final UMKM turun menjadi 0,5%. Perubahan

penurunan tarif PPH Final ini bertujuan mempermudah pelaku UMKM dalam menjalankan kewajiban perpajakannya pada negara. Serta dengan menurunnya tarif PPh Final yang harus disetorkan UMKM, dapat memberikan kesempatan untuk mengembangkan usaha dan melakukan investasi karena keringanan ini. Penurunan tarif PPH Final ini memberikan dampak yang cukup baik. Berdasarkan data Ditjen Pajak, ada peningkatan jumlah wajib pajak pembayar PPh Final UMKM. Ada 463.094 wajib pajak yang baru membayar pada periode Agustus-Desember 2018 dan jumlah itu belum pernah membayar pajak UMKM pada periode sebelumnya. Lalu dari angka itu, sebanyak 311.197 wajib pajak baru terdaftar per tanggal 1 Juli 2018.

Upaya yang dapat mendukung kinerja UMKM dalam meningkatkan daya saing Berikut ini dijelaskan upaya yang dapat dilakukan untuk mendukung kinerja UMKM dalam meningkatkan daya saing ialah : (a). Mengenai efektivitas Efektivitas pelaksanaan program pengembangan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) sebagai tempat pelatihan. Dengan mengadakan pembinaan-pembinaan seperti kursus, pameran dan seminar secara rutin untuk lebih maju dan berkembang dalam menjalankan usaha. Dengan pembinaan yang maksimal tentunya juga dapat menghasilkan para pelaku UMKM yang berdaya guna dan berhasil guna sehingga bisa bersaing di pasar dalam maupun luar negeri. Sejauh ini minat pelaku UMKM sangat positif dan semangat sekali dalam mengikuti berbagai sosialisasi yang di adakan; (b). Mengenai Dana Anggaran atau Biaya Defisit Anggaran yang memberikan dampak kurang efektifnya seluruh program-program seperti pelatihan hingga pengawasan. Faktor biaya dan anggaran tentunya sangat berperan di sini. Maka dari itu butuh kondisi

keuangan yang stabil dari pihak pemerintah agar segala kegiatan pelatihan, pengembangan, pemberdayaan, sosialisasi dan pengawasan berjalan baik dan sebagai mana mestinya; (c). Kemampuan teknik produksi dan manajemen terbatas Pola manajemen yang sesuai dengan kebutuhan terhadap perkembangan usaha sulit di temukan, antara lain karena pengetahuan dan manajerial skill pengusaha kecil dan menengah belum mampu menyusun strategi bisnis yang tepat. Kemampuan usaha dalam mengorganisasikan diri dan karyawan masih lemah, sehingga terjadi pembagian kerja yang tidak jelas dan seringkali pengusaha harus bertindak "one men show"; (d). Sumber Daya Manusia Dikarenakan di karenakan kurangnya pengawasan dari pihak Dinas kepada para pelaku UMKM, masih belum di bentuknya jadwal yang teratur untuk pengawasan yang di lakukan dan juga minimnya tenaga kerja atau pegawai yang langsung terjun ke lapangan untuk mengawasi para pelaku UMKM saja para pelaku usaha yang tidak mengurus surat izin berdiri usaha dan seringkali masih banyak di temukan UMKM yang berdiri tanpa izin dan tidak terdaftar di Dinas Koperasi dan UMKM Kota; (e). Pemasaran yang relatif sulit Di harapkan pada struktur pasar yang sangat kompetitif. Bukan saja antara industri kecil melainkan ada kalanya juga dengan industri besar. Disamping itu, kesulitan pemasaran juga disebabkan oleh berbagai faktor pendukung utama seperti informasi mengenai perubahan dan peluang pasar yang ada di dalam maupun di luar negeri.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

Ariani dan Mohamad Nur Utomo. 2017. **Kajian Strategi Pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) DI Kota Tarakan.** Jurnal Organisasi dan

## **JURNAL STINDO PROFESIONAL**

Volume VI | Nomor 6 | Nopember 2020

I S S N : 2443 – 0536

Manajemen. Vol 13. Universitas Borneo Tarakan.

Emas Prasasti. 2016. **Studi Deskriptif tentang Faktor Penghambat Pengembangan Industri Kecil dan Menengah di Kampung Binaan Bordir di Kelurahan Kedung Baruk Kecamatan Rungkut Surabaya.** Jurnal Kebijakan dan Manajemen Publik. Vol 4. Universitas Airlangga

Putri, E.H. 2017. **Efektivitas Pelaksanaan Program Pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Kota Samarinda (Studi pada Dinas Koperasi dan UMKM Kota Samarinda).** eJournal Administrasi Negara. Vol 5. Universitas Mulawarman

Hamid Edy Suandi & Susilo Y. Sri . (2011). **Strategi pengembangan usaha mikro kecil dan menengah di provinsi daerah istimewa Yogyakarta.** Jurnal ekonomi pembangunan, Vol.12, Nomor 1, Juni 2011, hlm.45-55.

Sakur. (2011). **Kajian faktor-faktor yang mendukung pengembangan usaha mikro kecil dan menengah: Studi kasus di Kota Surakarta.** Spirit publik, vol. 7, nomor 2: 85-110 ISSN. 1907- 0489 Oktober 2011.

Tambunan, tulus. 2009. **UMKM di Indonesia.** Bogor. Penerbit Ghalia Indonesia  
Tambunan, tulus. 2001. **Permasalahan UMKM dan isu penting di Indonesia .** Jakarta. LP3ES

Hafsah, M. J. 2004. **Upaya Pengembangan Usaha kecil dan Menengah (UKM).** Infokop No. 25 Tahun XX.

Ayu Yuliani, 2017. **Kemenkop UKM : 3,97 Juta UMKM Sudah Go Online.** CNN Indonesia.

Dinda Amalia. 2020. **Pengertian, Jenis dan Perkembangan UMKM di Indonesia.** Jurnal Entrepreneur.

Ning Rahayu. 2017. **Daya Saing UMKM Indonesia Relatif Rendah.** Warta Ekonomi.co.id

Dina Lathifa. 2019. **Perkembangan UMKM di Indonesia.** Online Pajak

Hariyanto. 2020. **Keterlambatan Memprediksi Kompetisi Bisnis Jadi Penyebab UMKM Sulit Berkembang.** Industry.co.id

Ervina. 2019. **Peran Penting UMKM dalam Sektor Ekonomi.** Talenta.co

Badan Pusat Statistik. 2013. **Jumlah Penduduk Miskin Maret 2013 Mencapai 28,07 Juta Orang**